

HOKKAIDOO KAITAKUSHI

**Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai
Salah satu persyaratan mencapai gelar
Sarjana Sastra**

oleh

DEWI FITRIA

NIM : 00110006



**JURUSAN SAJEPANG
FAKULTAS SAJEPANG
UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JAKARTA
2004**

Skripsi Sarjana yang Berjudul :

HOKKAIDOO KAITAKUSHI

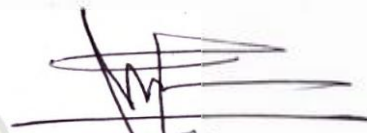
Telah diuji dan diterima baik (lulus) pada tanggal 3 Agustus, tahun 2004
dihadapan Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Sastra.

Panitia/Penguji

Pembimbing I/Penguji



(Dra. Yuliasih Ibrahim)



(Prof. Dr. I Ketut Surajaya, MA)

Ketua Sidang/Penguji

Pembimbing II/Penguji



(Dra. Tini Priantini)



(Syamsul Bahri, SS)

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan Bahasa
dan Sastra Jepang

Dekan Fakultas Sastra



(Dra. Yuliasih Ibrahim)



(Dra. Inny C. Haryono, MA)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1), jurusan Asia Timur pada Fakultas Sastra Universitas Darma Persada.

Terselesainya penulisan ini tidak lepas dari bantuan berberbagai pihak, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Ketut Surajaya, MA, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Syamsul Bahri, SS, selaku pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini.
3. Ibu Dra. Yuliasih Ibrahim, selaku Ketua Jurusan Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang.
4. Ibu Dra. Tini Priantini, selaku Pembantu Dekan II dan Ketua Sidang Skripsi Sarjana, serta selaku Pembimbing Akademik.
5. Buat ayah dan Ibu yang telah memberikan dorongan, semangat serta pengorbanan moril dan materil sampai saat ini.

6. Uni Meri dan bang Ardi, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya, dan tak ketinggalan juga buat keponakan tercinta, Esa Prima Putra dan Lulu Nisa Amali.
7. Seluruh angkatan '00, khususnya buat anggota "FORKA" (friends4ever) dan untuk semua teman seperjuangan, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam hal isi maupun penyajiannya, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan agar kekurangan itu tidaklah mengecilkan arti dari tulisan ini, dan dengan senang hati penulis menerima tanggapan dan saran-saran demi kesempurnaannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa Universitas Darma Persada.

Jakarta , Agustus 2004

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Ruang Lingkup	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II AWAL PEMBANGUNAN NEGARA JEPANG	9
2.1 Lahirnya Restorasi Meiji	9
2.2 Perubahan-perubahan yang Dilakukan Pemerintahan Meiji dalam Pembangunan Negara Jepang	15
2.2.1 Adanya Pembaharuan di Berbagai Bidang	15
2.2.2 Perubahan Kebijakan Pembangunan Hokkaidoo dan Dampaknya bagi Suku Ainu	18

BAB III	<i>HOKKAIDOO KAITAKUSHI</i>	22
3.1	Awal Terbentuknya <i>Hokkaidoo Kaitakushi</i> pada Tahun 1869	22
3.1.1	Didirikannya Kota Sapporo	24
3.1.2	Bantuan Dari Negara Barat	25
3.2	Terjadinya Skandal di <i>Hokkaidoo Kaitakushi</i> pada Tahun 1881	27
3.2.1	Usulan Penjualan Aset-aset <i>Hokkaidoo Kaitakushi</i>	27
3.2.2	Tuntutan Pemecatan Okuma	34
3.2.3	Pembatalan Usulan Penjualan Hak Milik <i>Hokkaidoo Kaitakushi</i>	37
BAB IV	KESIMPULAN	42
	DAFTAR PUSTAKA	46
	GLOSSARY	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1868, setelah setahun pemerintahan Shogun Tokugawa runtuh, Jepang kembali ke pemerintahan langsung oleh Kaisar. Perpindahan kekuasaan dari Shogun ke Kaisaran ini dikenal sebagai Restorasi Meiji. Periode Meiji merupakan jangka waktu penting yang menandai terjadinya perubahan masyarakat feodal Jepang ke dalam negara industri modern berbentuk pemerintahan yang parlementer.¹

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa perpindahan kekuasaan ini terjadi karena adanya kudeta pada 3 Januari 1868 yang dilatarbelakangi oleh perlawanan anti shogun, dipimpin oleh daerah yang mempunyai pengaruh besar di selatan yaitu Satsuma (kini Kagoshima Prefecture) dan Chooshu (kini Yamaguchi Prefecture) yang menangkap anggota istana kerajaan di Kyoto dan diumumkan secara formal untuk kembali pada bentuk kekuatan politik dari kekuasaan Shogun Tokugawa ke bentuk kerajaan.²

Pada masa ini pemerintahan Meiji yang baru menginginkan agar negaranya sejahtera dan tentaranya kuat, serta berusaha memodernisasikan

¹ Kodansha, *Encyclopedia Of Japan* (Tokyo: Kodansha International Ltd, 1983), him. 115

² *Ibid*

negaranya di berbagai bidang, maka dilakukanlah pembaharuan-pembaharuan oleh pemerintah Meiji untuk pengembangan negara Jepang. Keinginan ini jugalah yang membuat mereka memandang pembangunan di Hokkaidoo penting untuk kemakmuran Jepang dan pertahanannya.

Hokkaidoo yang sebelumnya bernama Ezo adalah pulau yang terletak paling utara dari gugusan pulau yang terdapat di pemerintahan Jepang. Selain itu, pulau ini juga merupakan pulau terbesar kedua dari empat pulau yang paling penting di Jepang. Pulau-pulau terbesar lain adalah Honshu, Shikoku, dan Kyuushuu.

Kepulauan Hokkaidoo terpisah dari Honshu ke selatan oleh Selat Tsugaru dan dibatasi oleh Laut Jepang di barat, dan Laut Pasifik di selatan dan timur. Beberapa gunung berbaris sepanjang kepulauan Hokkaidoo, semuanya termasuk dalam pegunungan Ezo. Ke arah barat dari pegunungan Ezo terbentang luas dataran Ishikari.

Hokkaidoo terletak antara $148^{\circ} 53'$ dan $139^{\circ} 20'$ Bujur Timur serta $41^{\circ} 21'$ dan $45^{\circ} 33'$ Bujur Utara. Luas Hokkaidoo sekitar 83.500 km², merupakan 22% dari total area Jepang. Sekitar 53% dari luas itu, belum dimanfaatkan karena area tanah Hokkaidoo itu masih meliputi pegunungan dan hutan. Iklim Hokkaidoo berganti-ganti, dari yang amat dingin di utara sampai daerah yang beriklim sedang di Selatan.³

³ Katarina Sjoberg, *The Return Of The Ainu. Cultural Mobilization And The Practise Of Ethnicity In Japan* (Australia: Harwood Academic Publishers, 1993), hlm. 117

Hokkaidoo dulunya didiami oleh suku Ainu yang merupakan suku asli bangsa Jepang. Suku inilah yang kemudian merasakan dampak negatif atas pembangunan Hokkaidoo. Suku Ainu yang hidup memancing dan berburu, kehilangan mata pencaharian dan lahan mereka. Sumber daya alam dan tanah yang terdapat di teritorial suku Ainu, digunakan untuk disesuaikan dengan tujuan pendirian negara Jepang yang baru, dimana kegiatan pertanian ditingkatkan sementara tidak diizinkan bagi kegiatan pemburuan dan pemancingan oleh suku Ainu.

Pada tahun 1869, karena melihat strategi penting dan produksi yang potensial dari Ezo, pemerintah Meiji mendirikan *Kaitakushi* (badan pembangunan), yang didirikan pada bulan Agustus tahun 1869 di Ezo dan menamakan kembali daerah itu Hokkaidoo dan Karafuto (Sakhalin). Di bawah ketentuan dari perjanjian St. Petersburg (1875), Sakhalin menjadi milik Rusia, dan pulau Kuril ditempatkan di bawah kewenangan *Kaitakushi*.⁴

Kaitakushi merupakan suatu badan pemerintahan untuk administrasi Hokkaidoo. *Kaitakushi* mempunyai markas besar di Sapporo. Dalam membantu perkembangan industrialisasi dan mempertahankan wilayah Hokkaidoo serta untuk membantu penduduk asli, pemerintah menginvestasikan modal yang besar. Sebagian besar dari pembangunan Hokkaidoo dipusatkan di daerah Sapporo.

⁴ Kodansha, *op.cit*, hlm. 113

Kaitakushi mempekerjakan banyak penasehat asing untuk memulai berbagai perusahaan yang dibiayai pemerintah, membantu dalam pembangunan jalan dan kereta api, mendidik pemuda - pemuda Jepang serta memperkenalkan teknik pertanian yang baru, dan untuk menyelesaikan eksperimen pertanian, didirikanlah Perguruan Tinggi Pertanian Sapporo (sekarang Universitas Sapporo).

Pada tahun 1871, *Kaitakushi* kemudian mengundang Horace Capron, seorang Sekretaris Jenderal pada Departemen Pertanian Amerika Serikat dibawah Kepresidenan Ulysses S. Grant, untuk menjadi penasehat di *Kaitakushi*. Pada saat yang sama, ia mulai mengimpor mesin-mesin dan teknologi-teknologi dari Amerika Serikat ke Hokkaido. Teknologi ini diharapkan akan dapat memicu perkembangan pembangunan Hokkaido sehingga dapat lebih terjadinya modernisasi.⁵

Kaitakushi juga aktif menjalin kerja sama dengan bekas samurai untuk mempercepat pembangunan di Hokkaido. Mereka yang berasal dari kelompok bekas samurai, khususnya dari timur laut Jepang, diberi kemudahan untuk berintegrasi dengan cara merekrut mereka ke dalam suatu sistem milisi/wajib militer (*Toondenhei*), yang bertanggung jawab untuk keamanan bidang pertanian dan pertahanan. Hal ini juga menjadikan para pekerja paksa sebagai sumber tenaga kerja tambahan.

⁵ www.google.com

Pada tahun 1881, satu tahun setelah pemerintah memutuskan untuk menjual perusahaannya ke pengusaha-pengusaha pribadi, Kuroda Kiyotaka, komisaris *Kaitakushi*, mengusulkan menjual semua kekayaan pemerintahan yang dimiliki Badan Pembangunan Hokkaido. Ia menjual kantor tambang batu bara, kereta api, pabrik pembuatan makanan kaleng dan milik lainnya di Hokkaido ke *Kansai Boeeki Kaisha*, suatu perkongsian dagang yang dipimpin oleh Godai Tomoatsu dengan harga yang sangat murah.⁶

Penjualan hak milik pemerintah ini mengakibatkan meletusnya protes-protes di media dan pihak oposisi di pemerintahan, hal ini terutama ditentang oleh Okuma Bhigenobu. Okuma kemudian dicurigai bersekongkol dengan anggota pemerintah lainnya untuk melawan pemerintahan, sebagai balasannya ia dipecat sebagai Perdana Menteri, peristiwa ini dikenal sebagai "Krisis 1881".⁷

Dengan keluarnya Okuma dari pemerintahan, maka pengaruh kelompok Satsuma-Chooshuu semakin kuat dalam pemerintahan. Pemerintah akhirnya menjual barang-barang milik pemerintah tersebut ke sektor swasta.⁸ Skandal politik pada tahun 1881 yang terpusat pada usulan pemerintah untuk menjual hak-hak milik pemerintahan, mengakibatkan bencana terbesar di pemerintahan pusat. *Kaitakushi* dihapuskan pada tahun

⁶ Kodansha, *op.cit.*, hlm. 113

⁷ M. Goedertier, *A Dictionary Of Japanese History* (New York: Wetaherhill, 1968), hlm. 87

1882, ketika tiga daerah administrasi Sapporo, Hokodate dan Nemuro didirikan. Pada tahun 1886, pulau itu dipersatukan dibawah komisi Hokkaido.⁹

1.2 Masalah

Seperti telah diuraikan di atas bahwa pemerintahan Meiji pada tahun 1869 mendirikan *Hokkaido Kaitakushi*, yaitu suatu badan pembangunan untuk administrasi Hokkaido. Dalam penulisan ini, penulis ingin mengetahui awal terbentuknya *Hokkaido Kaitakushi* hingga terjadinya skandal di atas penjualan hak-hak milik *Hokkaido Kaitakushi*.

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan mengenai awal pembentukan *Hokkaido Kaitakushi* dan terjadinya skandal di *Hokkaido Kaitakushi* pada tahun 1881, yang berakhir dengan penghapusan *Hokkaido Kaitakushi* pada tahun berikutnya.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang membatasi isi penulisan ini adalah mengenai awal pembentukan *Hokkaido Kaitakushi* sampai akhirnya terjadi skandal yang

⁸ Ketut Surajaya, *Pengantar sejarah Jepang II* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hlm.30

⁹ Joseph, *loc.cit*

menyebabkan *Hokkaidoo Kaitakushi* dihapuskan, pada kurun waktu antara tahun 1869 sampai tahun 1882.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan. Sifat pembahasannya adalah deskriptif analisis berdasarkan data kepustakaan, yang diperoleh dari perpustakaan Universitas Darma Persada dan Japan Foundation serta beberapa informasi dari internet dan berbagai bahan lain yang relevan untuk penulisan ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terbagi menjadi 4 bab, yaitu:

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, masalah, tujuan, ruang lingkup, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Menceritakan tentang awal pengembangan negara Jepang yang dimulai pada masa Restorasi Meiji, sehingga menimbulkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintahan Meiji dalam mengembangkan negaranya dan dampak perubahan kebijaksanaan pembangunan Hokkaidoo bagi suku Ainu.
-

Bab III : Menjelaskan awal terbentuknya *Hokkaidoo Kaitakushi* pada tahun 1869, hingga terjadinya skandal di *Hokkaidoo Kaitakushi* pada tahun 1881 yang menyebabkan dihapuskannya *Hokkaidoo Kaitakushi* pada tahun 1882.

Bab IV : Merupakan bab terakhir dari penulisan yang merupakan kesimpulan dari apa yang sudah dibahas oleh penulis pada bab sebelumnya.

